

**ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PERIODE 2022-2024**

Delia Delvia¹

Nona Jane Onoyi²

¹Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

² Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Batam

050068171@ut.ac.id

Abstract

Financial reports are crucial for ensuring openness and accountability in regional financial management. Nonetheless, issues such as non-adherence to Government Accounting Standards (SAP), inconsistency, and limited public access to financial data often persist in local governments. This study seeks to evaluate the quality of financial reports produced by the Regional Development Planning, Research and Development Agency (Bappelitbangda) of Ogan Komering Ulu Regency for the 2022–2024 period, focusing on adherence to SAP, as well as transparency and consistency in reporting. This research employs a qualitative descriptive methodology, using data gathering methods such as observation, interviews, and document analysis. The study's findings indicate that the Bappelitbangda financial report has been formulated in compliance with accrual-based SAP, aided by the SIPD application system and technical directives from BKAD. The compliance level with SAP is notably strong, as shown by the continuously acquired Unqualified Opinion (WTP) over three years. Moreover, openness is achieved by the inclusion of supporting documents and the online publishing of LKPD, while consistency is demonstrated by the regularity of the report structure throughout the years. The analysis concludes that the quality of Bappelitbangda's financial reports quite adheres to the norms of public accountability. It is essential to enhance human resource capability and strengthen internal oversight to sustain and elevate the quality of financial reporting moving forward.

Keywords: *Accountability, Consistency, Financial Statements, SAP, Transparency*

Abstrak

Laporan keuangan sangat penting untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, masalah-masalah seperti ketidakpatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), inkonsistensi, dan terbatasnya akses publik terhadap data keuangan sering terjadi di pemerintah daerah. Penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk periode 2022–2024, dengan fokus pada kepatuhan terhadap SAP, serta transparansi dan konsistensi dalam pelaporan. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Bappelitbangda telah disusun sesuai dengan SAP berbasis akrual, dibantu oleh sistem aplikasi SIPD dan arahan teknis dari BKAD. Tingkat kepatuhan terhadap SAP sangat kuat, seperti yang

ditunjukkan oleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang terus diperoleh selama tiga tahun. Selain itu, keterbukaan dicapai melalui pencantuman dokumen pendukung dan penerbitan LKPD secara daring, sedangkan konsistensi ditunjukkan melalui keteraturan struktur laporan dari tahun ke tahun. Analisis menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan Bappelitbangda cukup mematuhi norma akuntabilitas publik. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan pengawasan internal sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan ke depannya.

Kata kunci: Akuntabilitas, Konsistensi, Laporan Keuangan, SAP, Transparansi

PENDAHULUAN

Laporan keuangan memberikan informasi mengenai status keuangan suatu entitas dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerjanya. Laporan keuangan membantu organisasi untuk mengungkapkan situasi keuangan dan kinerja bisnis mereka. Dengan demikian, pelaporan keuangan seharusnya membantu orang-orang dalam membuat keputusan keuangan (Hidayat, 2018). Laporan keuangan membantu investor, kreditor, manajemen, auditor, dan masyarakat untuk mengevaluasi tanggung jawab, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Para pemangku kepentingan bisnis, pemerintah daerah, dan negara bagian membutuhkan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan transparan untuk mempercayai kinerja suatu organisasi.

Di lingkungan pemerintah daerah, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tetapi juga sebagai dasar evaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran (Lestari, 2022). Pemerintah pusat menangani anggaran yang sangat besar setiap tahun, oleh karena itu pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang konsisten, terbuka, dan bertanggung jawab (Nislandi, 2023). Dalam upaya menjamin kualitas informasi yang disampaikan, maka Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik. SAP memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevansi, keandalan, keterpahaman, dan kelengkapan (Nuri, 2024). Dengan SAP, laporan keuangan harus menunjukkan manajemen keuangan negara bagian dan daerah serta membangun kepercayaan publik terhadap anggaran manajemen.

Namun, berbagai tantangan masih dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Permasalahan seperti rendahnya tingkat konsistensi pelaporan, minimnya transparansi, dan ketidakpatuhan terhadap SAP sering kali ditemukan dalam praktiknya. Dari audit BPK selama tiga tahun terakhir, meskipun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah secara nasional meningkat, masih terdapat daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau bahkan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Pada tahun 2023, sekitar 89% pemerintah daerah memperoleh opini WTP, sementara sisanya masih menghadapi kendala dalam penyajian dan pengelolaan laporan keuangan (Widilestariningtyas, 2023). Kondisi ini menunjukkan pentingnya evaluasi kualitas laporan keuangan sebagai langkah untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Salah satu instansi yang memiliki peran strategis dalam hal ini adalah Bappelitbangda. Bappelitbangda merupakan instansi yang memiliki peran strategis dalam merancang program pembangunan, penelitian, serta pengelolaan anggaran daerah, juga dihadapkan pada tantangan dalam menyusun laporan keuangan yang

berkualitas (Fitria, 2022). Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bappelitbangda bertanggung jawab atas perencanaan puluhan program dan kegiatan setiap tahunnya, dengan mengelola alokasi anggaran demi mendukung pembangunan daerah. Kinerja dan kualitas laporan keuangan Bappelitbangda menjadi cerminan tata kelola keuangan yang baik, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah (Wurara, 2020). Oleh karena itu, laporan keuangan Bappelitbangda harus dievaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan di bidang ini.

Meskipun Bappelitbangda Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara tepat waktu, masih diperlukan analisis mendalam terhadap kualitas laporannya, terutama terkait dengan struktur penyajian, kelengkapan, kepatuhan terhadap SAP, transparansi, dan konsistensi pelaporan. Berdasarkan penyerahan LKPD tahun 2024, BPK menekankan pentingnya laporan keuangan yang mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan keuangan daerah dan menjadi dasar pemeriksaan yang objektif (Darmawati, 2024). Meskipun demikian, opini BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Ogan Komering Ulu dalam tiga tahun terakhir perlu ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelaporan keuangan Bappelitbangda telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Penelitian sebelumnya telah menguji kualitas laporan keuangan pada SKPD seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penelitian Rompas (2022) menunjukkan bahwa laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado kredibel, relevan, dan cerdas serta mematuhi SAP dan persyaratan terkait. Penelitian tersebut juga menyoroti perlunya peningkatan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kualitas pelaporan. Di sisi lain, penelitian di BPKAD Kota Bandar Lampung mengungkapkan masih adanya penurunan opini BPK akibat kendala internal seperti kurangnya kompetensi SDM, lemahnya sistem administrasi, serta faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan koordinasi pusat-daerah yang belum optimal. Namun, penelitian yang lebih spesifik mengenai kualitas laporan keuangan pada Bappelitbangda, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, masih sangat terbatas. Padahal, Bappelitbangda memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang berbeda dari SKPD pengelola keuangan lainnya. Gap penelitian ini menjadi urgensi tersendiri, karena analisis yang lebih spesifik akan memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran bagi peningkatan kualitas pelaporan keuangan di Bappelitbangda OKU.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana kualitas laporan keuangan Bappelitbangda Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2022–2024 ditinjau dari aspek struktur penyajian, kelengkapan, kepatuhan terhadap SAP, serta transparansi dan konsistensi pelaporan?”. Penelitian ini untuk menganalisis kualitas laporan keuangan Bappelitbangda Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2022–2024 dengan fokus pada struktur penyajian, kelengkapan, kepatuhan terhadap SAP, serta transparansi dan konsistensi pelaporan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan Bappelitbangda OKU secara berkelanjutan dan memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi maupun akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

Laporan Keuangan

Akuntan membuat laporan keuangan untuk berbagi data keuangan dengan pihak-pihak terkait. Laporan ini penting untuk pengambilan keputusan dan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu pengguna dalam pengambilan keputusan keuangan (Hidayat, 2018). Laporan keuangan sangat penting bagi perencana modal karena memberikan wawasan tentang kelancaran fungsi perusahaan, profitabilitas, dan potensi dividen. Dengan informasi ini, pemegang saham dapat memutuskan apakah akan menyimpan, menjual, atau membeli saham (Hidayat, 2018).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pemerintah daerah memerlukan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk menyediakan laporan keuangan yang transparan. SAP mengharuskan pemerintah daerah untuk menggunakan aturan akuntansinya dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan revisinya. SAP memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria hukum dan memberikan informasi yang penting, mudah dipahami, dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan. Pengelolaan keuangan yang jujur dan bertanggung jawab mendorong pemerintahan yang kuat, kepercayaan publik, dan pengendalian anggaran daerah. Akuntansi pemerintah mencatat dan melaporkan transaksi lembaga pemerintah. Laporan akuntansi pengelolaan administrasi keuangan negara disediakan oleh akuntansi pemerintah. Namun, anggaran negara mengendalikan pengeluaran dan memastikan kesesuaian dengan peraturan (Agustina, 2024).

Selain itu, penerapan SAP memainkan peranan yang krusial dalam meningkatkan integritas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberikan struktur yang teratur dan seragam dalam pencatatan, penilaian, dan penyampaian transaksi keuangan. SAP yang berlandaskan akrual memungkinkan pemerintah daerah untuk mendokumentasikan semua aktivitas keuangan dengan lengkap dan tepat waktu, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi finansial yang sesungguhnya. Penerapan SAP membantu pemerintah daerah berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan, seperti masyarakat dan lembaga pengawas, untuk menjamin pemanfaatan uang publik secara terbuka dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan SAP membantu pemerintah daerah menyediakan pelaporan keuangan yang sah dan etis (Zai et al, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kualitas laporan keuangan yang disusun oleh Bappelitbangda Kabupaten Ogan Komering Ulu pada periode 2022–2024. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai struktur laporan, kelengkapan, kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta transparansi dan konsistensi penyajian laporan keuangan selama periode tersebut. Menurut Creswell (2013) dalam (Handoko, 2024), metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan, menyelidiki, dan memahami implikasi dari berbagai individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami realitas yang terjadi di lapangan secara rinci, terbuka, dan mendalam, serta berdasarkan pengalaman dan pandangan informan. Sementara itu, Sugiyono (2009) dalam (Tanjung, 2020),

menambahkan bahwa metode deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menampilkan data atau angka, tetapi juga menginterpretasikan konteks, fenomena, dan makna di balik penyajian laporan keuangan Bappelitbangda OKU.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan staf keuangan dan perencanaan Bappelitbangda OKU yang menyusun laporan keuangan. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan Bappelitbangda OKU tahun 2022–2024, meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, CaLK, laporan perubahan ekuitas, dan laporan operasional. Analisis kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan simpulan. Untuk mengungkap pola dan makna penting dalam data, penelitian ini mereduksi data dengan cara memilih, memusatkan, menyederhanakan, dan mengorganisasikannya. Tahapan ini penting untuk menjaga relevansi data yang dianalisis dan memastikan hasil penelitian mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kepatuhan Laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. SAP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (Prayogo, 2023). Berdasarkan hasil penelitian ini, penyusunan laporan keuangan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Ogan Komering Ulu selama periode 2022–2024 telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi terhadap SAP. Proses penyusunan laporan keuangan di Bappelitbangda dilakukan secara rutin dua kali dalam satu tahun anggaran, yaitu laporan *unaudited* yang disusun pada awal tahun dan laporan *audited* yang disusun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), umumnya pada bulan Juli. Hal ini disampaikan oleh Kasubag Keuangan, Ida Andriani, yang menjelaskan bahwa *“proses penyusunan laporan keuangan edisi unaudited disusun pada awal tahun sebagai bahan pemeriksaan rutin oleh BPK dan laporan audited disusun setelah hasil pemeriksaan BPK”* (wawancara, 20 Mei 2025). Laporan tersebut kemudian diserahkan kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten OKU sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dalam kepatuhan terhadap SAP, Bappelitbangda telah mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar pelaporan keuangan berbasis akrual. Hal ini berarti bahwa pendapatan dan belanja diakui pada saat hak dan kewajiban timbul, bukan hanya ketika kas diterima atau dikeluarkan. Leni Meriani, sebagai penyusun laporan keuangan, menyampaikan bahwa *“laporan keuangan Bappelitbangda sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan karena setiap instansi diberi panduan melalui Surat Edaran Bupati OKU yang berisi format-format yang harus diisi dan sosialisasi oleh BKAD sebagai persiapan penyusunan laporan keuangan”* (wawancara, 20 Mei 2025). Pernyataan ini menunjukkan adanya sistem koordinasi formal serta penyusunan panduan teknis yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan sesuai SAP. Selain

itu, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung kepatuhan terhadap SAP (Fitriasari, 2024).

SIPD memfasilitasi penyusunan dan pelaporan keuangan yang mencakup format-format standar seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sistem ini secara otomatis menyelaraskan pengkodean akun, klasifikasi belanja, dan struktur penyajian laporan sesuai dengan ketentuan SAP. Dengan adanya SIPD, akurasi dan integritas data laporan keuangan dapat lebih terjamin, serta mengurangi risiko kesalahan teknis dalam penyusunan laporan (Naida, 2024).

Tabel 1. Neraca Bappelitbangda Periode 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Jumlah Aset Lancar	0	1,653,365.75	2,768,400.00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	0	0	0
Jumlah Aset Tetap	18,778,898,069.00	18,539,877,023.00	18,539,877,023.00
Jumlah Aset Lainnya	2,310,159,305.99	254,057,229.49	254,057,229.49
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	7,349,417.00	11,714,391.00	5,665,107.00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Jumlah Ekuitas	2,302,809,888.99	18,782,219,861.49	18,530,451,167.00
Jumlah Kewajiban Jangka Dan Ekuitas	2,317,508,722.99	18,793,934,252.49	18,536,116,274.00

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 1 menunjukkan kondisi neraca Bappelitbangda tahun 2022–2024. Selama periode ini, terjadi peningkatan signifikan pada aset lancar, dari nol di tahun 2022 menjadi Rp2.768.400,00 di tahun 2024. Aset tetap sedikit menurun, sementara aset lainnya turun drastis dari Rp2,3 miliar menjadi Rp254 juta sejak 2023. Kewajiban jangka pendek sempat naik di 2023 lalu menurun di 2024, dan tidak terdapat kewajiban jangka panjang. Ekuitas mengalami lonjakan besar dari Rp2,3 miliar di 2022 menjadi lebih dari Rp18,5 triliun di 2024, menunjukkan pertumbuhan kekayaan bersih yang signifikan.

Tabel 2. Laporan Operasional Bappelitbangda Periode 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Surplus/Defisit LO	10.087.317.126,20	8.346.673.643,00	9.007.231.996,66

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 2 menunjukkan Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO) Bappelitbangda pada periode 2022–2024. Pada tahun 2022, tercatat surplus sebesar Rp10.087.317.126,20 yang kemudian mengalami penurunan menjadi Rp8.346.673.643,00 di tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, terjadi peningkatan kembali menjadi Rp9.007.231.996,66. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika kinerja operasional lembaga dalam tiga tahun terakhir.

Penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam aspek teknis, khususnya terkait pemahaman terhadap format dan prosedur SAP. Bambang Sihono, Bendahara Pengeluaran, menyebutkan bahwa “*adanya format yang kurang dipahami karena minimnya pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga instansi yang mengalami kendala biasanya melakukan koordinasi langsung dengan BKAD melalui bidang Akuntansi dan Pelaporan*” (wawancara, 20 Mei 2025). Keterbatasan pelatihan ini

berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pengisian laporan, meskipun tidak berdampak signifikan terhadap hasil akhir pelaporan yang tetap sesuai dengan standar. Pada pengawasan dan pengendalian internal, keterlibatan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Kepala Badan dalam proses verifikasi laporan keuangan turut memastikan bahwa prosedur pelaporan dijalankan secara akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, penggunaan akun dan klasifikasi belanja dari SIPD yang telah distandarkan juga memperkuat konsistensi laporan keuangan dari tahun ke tahun.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu selama periode 2022-2024 menjadi bukti konkret bahwa laporan keuangan, termasuk dari Bappelitbangda sebagai salah satu OPD penyumbang laporan, telah memenuhi ketentuan SAP. Opini ini menegaskan bahwa laporan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan mencerminkan kondisi keuangan yang wajar, tanpa adanya kesalahan material yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan laporan keuangan Bappelitbangda terhadap SAP selama tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Mekanisme koordinasi antarbagian, dukungan regulasi dari pemerintah daerah, serta penerapan sistem berbasis teknologi seperti SIPD merupakan faktor-faktor kunci yang mendorong keberhasilan penerapan SAP di Bappelitbangda (Septiani, 2024). Namun, agar kepatuhan ini dapat terus ditingkatkan, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan pendampingan secara rutin, agar seluruh pegawai yang terlibat dalam pelaporan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai standar akuntansi yang berlaku.

Transparansi dan Konsistensi dalam Penyajian Laporan Keuangan

Transparansi dan konsistensi merupakan dua prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada akuntabilitas. Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Ogan Komering Ulu, prinsip-prinsip ini telah menjadi landasan penting dalam penyusunan laporan keuangan selama periode 2022 hingga 2024.

1. Upaya Mewujudkan Transparansi

Dalam mewujudkan transparansi laporan keuangan, Bappelitbangda Kabupaten OKU telah melakukan berbagai langkah konkret. Menurut keterangan dari Ida Andriani selaku Kasubag Keuangan, transparansi dijaga melalui pelampiran dokumen pendukung yang relevan dan sah secara hukum, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), rekening koran dari bank yang telah ditandatangani oleh pihak bank, serta surat pernyataan dari Kepala Instansi atau OPD yang ditandatangani di atas materai sebagai bentuk autentikasi data keuangan (wawancara, 20 Mei 2025).

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bappelitbangda Periode 2022-2024

2022			
Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Bertambah / Berkurang
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)
Surplus / (Defisit)	9,986,556,264.00	9,284,190,614.00	92,97
2023			
Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Bertambah / Berkurang
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)

Surplus / (Defisit)	8.104.882.786	7.594.086.933,00	93,70
2024			
Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Bertambah / Berkurang
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)
Surplus / (Defisit)	10.025.601.486,00	0.00	0.00

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan data laporan surplus/defisit dari tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya tren penurunan dalam realisasi anggaran. Pada tahun 2022, anggaran setelah perubahan sebesar Rp9.986.556.264,00 terealisasi sebesar Rp9.284.190.614,00 atau 92,97%. Tahun 2023 mengalami penurunan dengan anggaran sebesar Rp8.104.882.786 dan realisasi sebesar Rp7.594.086.933,00 atau 93,70%. Sementara itu, pada tahun 2024 terjadi defisit sebesar Rp10.025.601.486,00 tanpa adanya realisasi sama sekali (0%), yang mengindikasikan tidak adanya pendapatan atau belanja yang direalisasikan di tahun tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tahun 2024.

Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas Bappelitbangda Periode 2022-2024

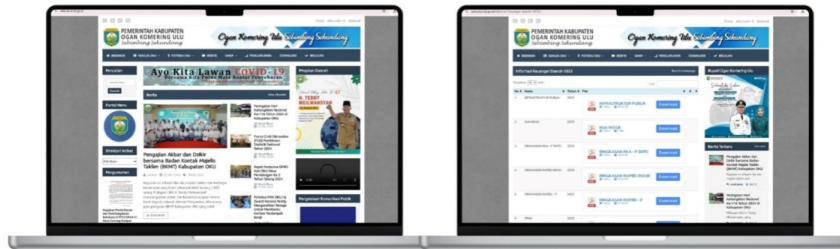
Uraian	2022	2023	2024
Ekuitas Awal	22.313.391.623,00	21.083.361.323,74	12.736.687.680,83
Surplus/Defisit LO	10.087.317.126,20	(8.346.673.642,91)	(9.007.231.996,66)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	11.309.998.008,46	-	-
Ekuitas Akhir	21.090.710.740,74	12.736.687.680,83	3.729.455.684,17

Sumber: Data diolah, 2025

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Bappelitbangda menunjukkan fluktuasi signifikan dalam ekuitas selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, ekuitas awal sebesar Rp22.313.391.623,00 mengalami penambahan dari surplus LO sebesar Rp10.087.317.126,20 serta dampak kumulatif koreksi kebijakan sebesar Rp11.309.998.008,46, namun ditutup dengan ekuitas akhir sebesar Rp21.090.710.740,74. Tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup tajam akibat defisit LO sebesar Rp8.346.673.642,91 sehingga ekuitas akhir menurun menjadi Rp12.736.687.680,83. Penurunan berlanjut pada 2024, dengan defisit LO yang lebih besar mencapai Rp9.007.231.996,66 dan tanpa ada koreksi tambahan, mengakibatkan ekuitas akhir turun drastis menjadi Rp3.729.455.684,17. Data ini mencerminkan tren penurunan ekuitas yang dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara pendapatan dan beban selama tiga tahun terakhir.

2. Aksesibilitas Informasi Keuangan

Meskipun laporan keuangan internal Bappelitbangda tidak disebarluaskan kepada publik secara langsung, transparansi tetap terwujud melalui integrasi laporan instansi ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dapat diakses oleh masyarakat luas yakni pada website berikut ini <https://web.okukab.go.id/>.



Gambar 1. Website *kominfo@okukab.go.id*

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Leni Meriani, penyusun laporan keuangan, bahwa akses publik terhadap laporan dilakukan melalui publikasi LKPD yang mencakup seluruh laporan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tersedia secara online (wawancara, 20 Mei 2025). Maka dari itu, prinsip keterbukaan informasi tetap dijunjung tinggi melalui jalur institusional yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Konsistensi dalam Penyusunan Laporan

Konsistensi menjadi faktor penting dalam memastikan validitas data antar tahun serta memudahkan proses analisis kinerja keuangan instansi. Berdasarkan pernyataan dari Bambang Sihono selaku Bendahara Pengeluaran,

“laporan keuangan Bappelitbangda disusun secara berkala dua kali dalam satu tahun, yakni laporan unaudited yang disusun pada awal tahun dan laporan audited setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Format laporan pun dijaga konsistensinya dari tahun ke tahun dan bila terdapat perubahan, maka disampaikan secara resmi melalui Surat Edaran atau langsung oleh BKAD bidang Akuntansi dan Pelaporan” (wawancara, 20 Mei 2025).

Konsistensi ini tidak hanya berlaku pada format, tetapi juga dalam struktur penyusunan, penyajian informasi, dan penggunaan klasifikasi akun berdasarkan SAP. Hal ini memudahkan proses perbandingan laporan antarperiode serta mendukung analisis penggunaan anggaran dan realisasinya dari tahun ke tahun. Format laporan yang digunakan mencakup LRA, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang semuanya dirancang dan disusun menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

4. Mekanisme Pengawasan Internal

Pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh unsur pimpinan dan pejabat struktural di lingkungan Bappelitbangda. Menurut Ida Andriani, *“pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Badan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK-SKPD), serta Bendahara Pengeluaran instansi”* (wawancara, 20 Mei 2025). Meskipun mekanisme pengawasan ini bersifat sederhana, namun telah berjalan sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku di lingkungan pemerintahan daerah. Keberadaan kontrol internal ini penting untuk memverifikasi keabsahan data, memastikan tidak terjadi manipulasi atau kekeliruan data, serta menjaga kualitas laporan yang disusun. Penelitian yang dilakukan oleh (Elkha, 2020) menegaskan bahwa efektivitas pengawasan internal sangat bergantung pada partisipasi aktif dari pimpinan instansi dan pengelola keuangan. Oleh karena itu, meskipun tidak memiliki unit pengawasan khusus, keterlibatan langsung pimpinan

dan pejabat teknis dalam proses penyusunan dan verifikasi laporan sudah merupakan bentuk pengawasan yang memadai.

5. Tanggapan terhadap Kualitas Transparansi dan Konsistensi

Tanggapan dari pimpinan instansi maupun auditor terhadap kualitas laporan keuangan Bappelitbangda cenderung positif. Leni Meriani mengungkapkan bahwa laporan keuangan dinilai telah memenuhi standar transparansi dan konsistensi, selama disusun sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku (wawancara, 20 Mei 2025). Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya temuan besar dari auditor dalam kurun waktu tiga tahun terakhir serta keseragaman format dan isi laporan dari tahun ke tahun. Keberadaan CaLK dalam setiap laporan juga turut memperkuat aspek transparansi, karena bagian ini memuat informasi penting yang menjelaskan secara rinci angka-angka dalam laporan utama (Adi, 2025). Informasi dalam CaLK mencakup kebijakan akuntansi, asumsi penyusunan laporan, serta penjelasan tambahan atas pos-pos yang memerlukan klarifikasi, sehingga pembaca laporan dapat memahami konteks dari setiap angka yang disajikan.

Secara keseluruhan, laporan keuangan Bappelitbangda Kabupaten Ogan Komering Ulu selama periode 2022–2024 telah menunjukkan tingkat transparansi dan konsistensi yang cukup baik. Meskipun terdapat keterbatasan dalam akses langsung terhadap laporan internal, mekanisme publikasi melalui LKPD memungkinkan masyarakat untuk tetap memperoleh informasi keuangan pemerintah secara makro. Selain itu, konsistensi dalam format dan proses penyusunan laporan memudahkan analisis keuangan lintas tahun dan mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Maka, Bappelitbangda disarankan untuk meningkatkan kapasitas pengawasan internal dan memperluas akses informasi dengan menyediakan ringkasan laporan keuangan secara terbuka melalui website resmi instansi. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat. Penelitian lain seperti (Samekto, 2025) juga menggarisbawahi bahwa transparansi dan konsistensi laporan keuangan merupakan pilar utama dalam membangun sistem keuangan daerah yang kredibel dan berdaya saing.

KESIMPULAN KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Bappelitbangda Kabupaten Ogan Komering Ulu selama periode 2022–2024 menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan disusun secara berkala dalam bentuk *unaudited* dan *audited*, serta telah mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Proses penyusunan laporan difasilitasi oleh penggunaan aplikasi SIPD dan didukung oleh koordinasi antarunit serta panduan resmi dari BKAD. Meskipun masih terdapat kendala teknis seperti keterbatasan pelatihan, hal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan karena tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama periode 2022-2024.

Dari sisi transparansi dan konsistensi, laporan keuangan Bappelitbangda telah menunjukkan keterbukaan dalam penyajian informasi melalui dokumen pendukung yang sah dan laporan yang terintegrasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dapat diakses publik secara online. Meskipun akses laporan internal bersifat terbatas, transparansi tetap terjaga melalui saluran resmi pemerintah. Selain itu,

format dan struktur laporan keuangan juga konsisten dari tahun ke tahun, serta dilakukan pengawasan internal oleh pimpinan instansi, PPK-SKPD, dan bendahara pengeluaran. Tanggapan positif dari auditor dan pimpinan menguatkan bahwa laporan yang dihasilkan bersifat transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Bappelitbangda tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga berdampak pada peningkatan akuntabilitas publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah. Oleh karena itu, disarankan agar Bappelitbangda terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis berkelanjutan mengenai SAP dan penggunaan SIPD. Selain itu, penting untuk memperluas aksesibilitas publik terhadap ringkasan laporan keuangan instansi melalui media resmi seperti website agar transparansi meningkat. Dengan menerapkan langkah tersebut, diharapkan kualitas laporan keuangan Bappelitbangda semakin optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, T. B., Azis, M. I., & SE, M. (2025). *Standar Akuntansi Pemerintahan: Panduan Lengkap untuk Transparansi Keuangan Publik*. Takaza Innovatix Labs.
- Darmawati, D., Kusumawati, A., Syamsuddin, S., Indrijawati, A., & Juanda, I. S. K. (2024). Pendampingan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dalam Upaya Menciptakan Laporan Keuangan Berkualitas di Kabupaten Pinrang. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 858-867.
- Elkha, F., & Wahidahwati, W. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 9(3).
- Fitria, S., Umam, K., & Farida, A. S. (2022). Pengaruh penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan bappelitbangda kabupaten bandung. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 826-844.
- Fitriasari, D. (2024). Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 34-54.
- Hidayat, W. W. (2018). *Dasar-dasar analisa laporan keuangan (Edisi pertama)*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lestari, N. K. E. K., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Analisis Implementasi E-Budgeting Menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, And Product) Serta Dampaknya Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik Di SKPD Kabupaten Karangasem. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(03), 810-821.
- Naida, N., & Sartika, D. (2024). Tantangan dan Strategi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berkualitas dengan SIPD: Studi Kualitatif di Kabupaten Tojo Una-Una. *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 99-109.
- Nislandi, N. A., & Munari, M. M. (2023). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas

- Pengelolaan Dana Desa Di Sidoarjo. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 143-150.
- Nuri, H., Arsyah, M., & Mariana, M. (2024). Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah Melalui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Efektif. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 1-8.
- Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). Analisis implementasi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 3(2), 44-58.
- Rompas, F. V. (2022). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 461-468.
- Samekto, A., Apriyanto, A., & Rustam, A. (2025). *Buku Ajar Akuntansi Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 7(4), 193-208.
- Surat Edaran Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2022-2024
- Tanjung, R., Arifudin, O., Sofyan, Y., & Hendar, H. (2020). Pengaruh penilaian diri dan efikasi diri terhadap kepuasan kerja serta implikasinya terhadap kinerja guru. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 380-391.
- Wurara, C. N., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah kota manado (studi di badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah kota manado). *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Widilestariningtyas, O., & Azijah, S. N. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Subang). *Journal of Economics, Management, Business and Accounting (JEMBA)*, 3(2), 139-150.